

Pengaruh Kurikulum Pendidikan dan Latihan Karyawan terhadap Loyalitas Karyawan dan Semangat Bela Negara

Gunarto Wardjono^{1)*}, Kus Indiyah²⁾, Hendaris Adriyanto³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Politeknik Jakarta Internasional, Indonesia

¹⁾ stefgw@yahoo.co.id



*Gunarto Wardjono

Histori Artikel:

Submit: 2025-03-14

Diterima: 2025-04-19

Dipublikasikan: 2025-04-23

Kata Kunci:

Kurikulum Pendidikan, Latihan Karyawan, Loyalitas, Semangat Bela Negara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai kurikulum pendidikan dan pelatihan korporasi X Network, khususnya di Pusdiklat X, serta dampaknya terhadap loyalitas karyawan dan semangat nasionalisme dalam lingkungan kerja. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sikap pemerintah terhadap perusahaan swasta yang memiliki program pertahanan negara serta kontribusinya dalam membangun kesadaran bela negara di sektor non-militer. Dengan menggunakan pendekatan campuran (metode campuran) yang menggabungkan Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif, penelitian ini membahas berbagai aspek terkait, termasuk bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi, siapa saja pihak yang terlibat dalam insiden tersebut, di mana lokasi kejadiannya, serta kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian dan analisis kurikulum Pusdiklat X menunjukkan bahwa pendekatan metode campuran dapat menjawab rumusan permasalahan utama, yaitu bahwa kurikulum ini awalnya tidak dirancang untuk pendidikan bela negara, melainkan lebih berfokus pada pengembangan karakter pegawai yang setia, disiplin, dan militan dalam menjalankan tugas mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penyesuaian lebih lanjut, sebagaimana yang telah diterapkan oleh Direktur Jenderal Pohtan dalam kurikulumnya. Selain itu, kesadaran sosial dan partisipasi karyawan dalam tindakan pertahanan negara juga sangat dipengaruhi oleh kurikulum ini. Hasil wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah menunjukkan bahwa meskipun inisiatif dan proaktif suatu lembaga dalam menjalankan program ini mendapat apresiasi, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal regulasi dan dukungan hukum yang lebih konkret untuk mendukung operasionalnya di masa mendatang.

Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

LATAR BELAKANG

Secara teoritis mempersiapkan kekuatan pertahanan negara adalah sebuah keharusan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian karena kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh suatu bangsa akan dapat menjadi daya tangkal yang ampuh untuk mencegah bangsa lain melakukan konfrontasi sesuai dengan adagium klasik "*civis pacem parra bellum*" bahwa apabila ingin damai harus siap untuk berperang (Zimmerli, 2018). Bahwa pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh komponen bangsa dan bertumpu pada komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Berangkat dari masalah perubahan ancaman dalam lingkungan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis dimana ancaman-ancaman nir-militer akan lebih mengemuka dibandingkan dengan ancaman militer maka persoalan pertahanan negara bukan lagi menjadi persoalan militer atau TNI saja melainkan menjadi persoalan semua komponen bangsa (Priyono & Yusgiantoro, 2017). Untuk membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara serta menggelorakan semangat bela bangsa diperlukan pendidikan bela negara yang berkelanjutan terhadap semua komponen bangsa, baik melalui pendidikan formal maupun

melalui pendidikan dan kegiatan non formal (Sinaga, 2017). Badan usaha korporasi merupakan aset nasional yang memiliki potensi sangat besar untuk dapat di dayagunakan sebagai kekuatan nir-militer, namun perangkat lunak berupa undang-undang dan regulasi pemerintah belum ada yang mengatur mekanisme pelibatan korporasi ini dalam sistem pertahanan negara sehingga akan menemui kendala dalam aktualisasinya (Angela & Kosandi, 2019).

STUDI LITERATUR

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat smesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakupi upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Pertahanan Negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tata nilai. Pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan baik (Kadiman, 2006) . Sebaliknya negara yang lemah tidak dapat memberikan rasa aman kepada warganya (Publications & Council, 2016).

Penyelenggaraan pertahanan negara bukan semata-mata ditujukan untuk perang, melainkan juga untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin ter-laksananya pembangunan nasional.

Fungsi pertahanan Indonesia diselenggarakan dengan Sistem Pertahanan Semesta. Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu Pertahanan Militer dan Pertahanan Nir-militer. Fungsi pertahanan militer yang diemban oleh TNI meliputi Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Inti pertahanan nirmiliter, yaitu pemberdayaan sumber daya nasional, yang meliputi fungsi kekuatan pertahanan nirmiliter dan pertahanan sipil (Kadiman, 2006).

Menurut Prabowo dalam buku berjudul “Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta”, bahwa dalam mencapai pemahaman perang semesta perlu dipahami terlebih dahulu pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Perang tidak sama dengan tempur, dan merupakan jalan terakhir apabila usaha diplomasi mengalami jalan buntu serta dilaksanakan dalam rangka melawan kekuatan negara lain yang secara nyata mengancam kemerdekaan, kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa Indonesia (Rizani, 2020). Selanjutnya Prabowo membahas Generasi Peperangan ditinjau dari penggunaan senjata, teknik, taktik dan strategi yang digunakan dalam peperangan, yaitu Perang Generasi kesatu hingga saat ini sudah mencapai Perang Generasi keempat. Agar lebih fokus pada persoalan ancaman masa kini, peneliti dalam tesis ini sengaja tidak membahas tentang Perang Generasi kesatu, kedua dan ketiga (Rizani, 2020).

Peperangan Generasi Keempat (4GW) merupakan peperangan asimetris dan non-linier yang menggunakan seluruh sarana dan sistem senjata yang ditujukan terutama untuk menghancurkan kemauan bertempur musuh. Deskripsi perang 4GW ini sangat dekat dengan perang semesta. Kadang kala terminologi 4GW juga diistilahkan sebagai peperangan inkonvensional (unconventional warfare/UW). Peperangan

generasi keempat ini adalah perang yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer, dan kemenangan perang dapat dicapai tidak hanya dengan memenangkan berbagai pertempuran bersenjata (Echevarria, 2005).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas konsep pertahanan negara dalam konteks Sistem Pertahanan Semesta (Kadiman, 2006), di mana pertahanan tidak hanya bersifat militer tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk sektor swasta. Prabowo (Rizani, 2020) menyoroti pentingnya pemahaman perang semesta, yang mencerminkan perlunya keterlibatan semua komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan negara. Selain itu, Echevarria (2005) membahas konsep Peperangan Generasi Keempat (4GW), yang menekankan bahwa ancaman terhadap negara tidak lagi bersifat konvensional tetapi lebih kompleks, termasuk ancaman ekonomi dan sosial. Meskipun studi-studi tersebut memberikan wawasan yang luas mengenai pertahanan negara, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji peran kurikulum pendidikan dan pelatihan di sektor korporasi dalam membentuk kesadaran bela negara serta meningkatkan loyalitas karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap dengan mengeksplorasi bagaimana kurikulum pendidikan di perusahaan swasta dapat berkontribusi terhadap semangat nasionalisme dan loyalitas karyawan, serta bagaimana kebijakan pemerintah dapat mendukung inisiatif tersebut. Hasil wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah menunjukkan bahwa meskipun inisiatif dan proaktif suatu lembaga dalam menjalankan program ini mendapat apresiasi, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal regulasi dan dukungan hukum yang lebih konkret untuk mendukung operasionalnya di masa mendatang.

METODE

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini tentang apa dan bagaimana suatu kejadian bisa terjadi, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut, dimana tempat kejadiannya dan bagaimana hasil dari kejadian tersebut maka penelitian ini akan menggunakan metode kombinasi (*mix method*) Metode Kuantitatif dan Metode Kualitatif (Creswell, 2018). Metode Kuantitatif digunakan dalam rangka mengkuantisir hasil survey yang dilakukan terhadap responden untuk mengidentifikasi sikap bela negara yang terukur dengan indikator dan sub-indikator yang telah ditetapkan (Samsu, 2017).

Metode kualitatif akan menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting dari sifat suatu kejadian, atau fenomena, atau gejala sosial, sehingga makna dibalik kejadian tersebut dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori (Creswell, 2013). Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena pelibatan korporasi X dalam pelatihan bela negara, yang bersifat deskriptif. Menyadari posisi peneliti dalam obyek penelitian juga menjadi bagian didalamnya maka untuk menghindari subyektifitas terhadap hasil survey, peneliti dibantu oleh pihak *independent reseacher*, dalam melakukan penelitian kuantitatif melalui distribusi angket, *data collecting*, *data processing*, dan tabulasi data (Creswell, 2018). Dari populasi seluruh peserta pelatihan sejumlah 931 orang, sebanyak 250 lembar kuesioner didistribusikan secara acak dan berhasil diperoleh jawaban yang lengkap untuk dapat diproses sebanyak 128 responden. Hal ini membuktikan bahwa posisi peneliti tidak mempengaruhi independensi responden dalam merespon kuesioner. Berdasarkan hasil akhir proses kuantitatif, peneliti melakukan analisis deskriptif kualitatif.

Penelitian survey melalui pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner bertujuan untuk, *pertama* mengukur semangat bela negara para responden dan mengukur keeratan hubungan sub-indikator terhadap indikator bela negara yang dibuat oleh Kementerian Pertahanan, *kedua* mengukur pengaruh pendidikan di tempat pelatihan terhadap loyalitas dan militansi peserta didik dan *ketiga* mengukur pengaruh pendidikan di lokasi pelatihan terhadap kepedulian sosial peserta didik. Penelitian ini memotret pengaruh pendidikan

terhadap peserta didik yang dikelompokkan dalam jabatan, gender, dan masa kerja. Pengelompokkan ini perlu untuk menilai apakah ada perbedaan pengaruh pendidikan ini terhadap peserta yang memiliki jabatan struktural dan bukan pejabat, karena biasanya setiap angkatan/batch pesertanya homogen, yakni kelompok pejabat atau non pejabat. Dari kacamata gender ingin dianalisis apakah terdapat perbedaan pengaruh pendidikan ini terhadap laki-laki dan terhadap perempuan, karena ada beberapa mata pelajaran yang membutuhkan kemampuan fisik. Dari masa kerja akan dianalisis apakah terdapat perbedaan pengaruh pendidikan ini terhadap karyawan dengan masa kerja tertentu. Untuk manfaat kepada manajemen X Network, dari demografi responden dapat dianalisis korelasi antara masa kerja dengan jenjang karir karyawan.

HASIL

Tabel yang ditampilkan merupakan hasil analisis mengenai Indikator Bela Negara, khususnya dalam aspek Cinta Tanah Air. Bela negara adalah konsep yang mencerminkan kesadaran, sikap, dan tindakan warga negara dalam mempertahankan serta memajukan negaranya. Salah satu indikator utama dalam bela negara adalah rasa cinta tanah air, yang dapat diukur melalui berbagai sikap dan tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis statistik menggunakan Koefisien Korelasi Spearman (Rho, ρ) dan Koefisien Determinasi (r^2) untuk mengukur hubungan antara variabel-variabel dalam indikator cinta tanah air. Koefisien Korelasi Spearman menunjukkan tingkat hubungan antara dua variabel, sedangkan Koefisien Determinasi menggambarkan seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen dalam model yang digunakan.

Tabel 1.
Indikator 1 Bela Negara

Indikator 1 : Cinta Tanah Air	Koefisien Korelasi ρ (Rho)	Koefisien Determinasi (p^2)
Bangga sebagai bangsa Indonesia	0,773	0,597
Selalu menjaga nama baik bangsa dan Negara	0,431	0,186
Melestarikan dan mencintai lingkungan hidup	0,338	0,114
Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara	0,329	0,108
Saya mengenal, memahami dan mencintai wilayah nasional Indonesia	0,272	0,074
Selalu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia	0,220	0,048

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi Cinta Tanah Air adalah 59,70 % mempengaruhi sub indikator Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Jika dikonsultasikan pada kriteria koefisien korelasi seperti disajikan pada tabel 3, menurut responden keeratan terkuat hubungan sub-indikator terhadap indikator ada pada sub-indikator “Bangga sebagai bangsa Indonesia” memperoleh skor 0,773 (kuat), hal ini berarti responden akan mencintai tanah airnya ketika ia memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Namun rata-rata keeratan sub indikator – sub indikator diatas terhadap indikator Cinta Tanah Air hanya mencapai skor 0,393 (rendah), artinya sub-indikator tersebut tidak cukup kuat korelasinya terhadap indikator Cinta Tanah Air.

Tabel 2
Indikator Sadar Berbangsa dan Bernegara

Indikator 2 : Sadar Berbangsa dan Bernegara	Koefisien Korelasi	Koefisien Determinasi
--	-----------------------	--------------------------

	p (Rho)	(p^2)
Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan	0,532	0,283
Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	0,431	0,186
Mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya	0,265	0,070
Membina kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan dari lingkungan terkecil (keluarga), lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja	0,254	0,065

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi Sadar berbangsa dan Bernegara adalah 28,30 % mempengaruhi sub indikator Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan. Ada indikasi yang menarik perhatian ketika pada sub-indikator “Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan” terdapat 30% responden yang menyatakan tidak setuju dan ragu-ragu, dan 70% setuju dan sangat setuju. Sedangkan pada sub indikator “Mengakui, menghargai dan menghormati bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya” 100% responden menyatakan setuju dan sangat setuju. Peneliti menilai kejujuran responden dalam menjawab kuesioner mendekati realita, karena tingginya keraguan manusia jika menyatakan mendahulukan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan adalah hal yang wajar. Jika dikonsultasikan pada kriteria koefisien korelasi seperti disajikan pada tabel 3, menurut responden keeratan terkuat hubungan sub-indikator terhadap indikator ada pada sub-indikator “Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan,” memperoleh skor 0,532 (sedang). Korelasi ini pun tidak cukup kuat namun dapat menggambarkan bahwa ketika seseorang mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi dan golongan ia dapat dikatakan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi.

Tabel 3.
Indikator 3 Yakin Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Indikator 3 : Yakin Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara	Koefisien Korelasi p (Rho)	Koefisien Determinasi (p^2)
Yakin pada kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara RI	0,783	0,613
Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara	0,670	0,449
Memahami nilai-nilai dalam Pancasila	0,480	0,230
Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	0,417	0,174

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi Yakin pada Pancasila sebagai ideologi negara adalah 61,30% mempengaruhi sub indikator Keyakinan pada kebenaran Pancasila. Jika dikonsultasikan pada kriteria koefisien korelasi seperti disajikan pada tabel 3.1 di halaman 31, menurut responden keeratan terkuat hubungan sub-indikator terhadap indikator ada pada sub-indikator “Yakin pada kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara RI” memperoleh skor 0,783 (kuat), hal ini sangat logis karena responden yakin pada pancasila karena yakin pada kebenaran falsafah dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Tabel 4

Indikator Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara		
Indikator 4 : Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara	Koefisien Korelasi ρ (Rho)	Koefisien Determinasi (p^2)
Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara	0,662	0,438
Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negara tidak sia-sia	0,651	0,424
Siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman	0,647	0,418
Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara	0,662	0,438
Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan	0,395	0,156

Sumber: Penulis (2025)

Berdasarkan tabel koefisien determinasi Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara adalah 43,80% mempengaruhi sub indikator Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Jika dikonsultasikan pada kriteria koefisien korelasi seperti disajikan pada tabel 3.1 di halaman 31, menurut responden keeratan terkuat hubungan sub-indikator terhadap indikator ada pada sub-indikator “Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara” memperoleh skor 0,603 (kuat), hal ini berarti kerelaan berkorban merupakan pendorong yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Agak berbeda dengan indikator lain, sub indikator dalam tabel ini menunjukkan keeratan yang rata-rata kuat dengan skor 0,603 yang berarti setiap sub indikator mempunyai korelasi yang kuat terhadap indikator induknya.

Tabel 5
Indikator 5 Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara

Indikator 5 : Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara	Koefisien Korelasi ρ (Rho)	Koefisien Determinasi (p^2)
Memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik	0,715	0,511
Memiliki keterampilan untuk mendukung kemampuan awal bela negara secara psikis	0,697	0,486
Memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis	0,620	0,384
Memiliki kondisi kesehatan jasmani untuk mendukung kemampuan awal bela negara secara psikis	0,606	0,367
Memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras dan tahan uji	0,518	0,268
Memiliki kecerdasan emosional	0,472	0,223
Memiliki kecerdasan intelektual	0,469	0,220
Gemar berolah raga	0,461	0,213
Memiliki kecerdasan spritual	0,457	0,209
Senantiasa memelihara jiwa dan raga	0,354	0,125
Senantiasa menjaga kesehatan saya	0,290	0,084

Sumber: Penulis (2025)

Dari tabel 5 koefisien determinasi Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara adalah 51,10% mempengaruhi sub indikator Memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik. Jika dikonsultasikan pada kriteria koefisien korelasi seperti disajikan pada tabel 3.1 di halaman 31, menurut responden keeratan terkuat hubungan sub-indikator terhadap indikator ada pada sub-indikator “Memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik ” memperoleh skor 0,715 (kuat), hal ini berarti responden masih memiliki paradigma bahwa kemampuan bela negara berkaitan erat dengan kemampuan secara fisik dan menjaga kesehatan relatif rendah korelasinya dengan bela negara, hasilnya sub indikator ini memperoleh skor terendah 0,290

(rendah).

Dari tinjauan kelima indikator dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Pusdiklat X memberikan pengaruh yang kuat terhadap semangat bela negara melalui sub indikator berikut ini:

Tabel 6.Kesimpulan

Pengaruh Pendidikan terhadap Bela Negara

Sub Indikator Terkuat		Koefisien Korelasi r
1	Bangga sebagai bangsa Indonesia	0,773
2	Mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan	0,532
3	Yakin pada kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara RI	0,783
4	Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara	0,662
5	Memiliki kemampuan awal bela negara secara fisik	0,715

Sumber: Penulis (2025)

Tanggapan responden terhadap sikap bela negara yang paling kuat dinyatakan dalam sub indikator keyakinan pada kebenaran Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara RI, hal ini mencerminkan bahwa kurikulum GMP (Golongan Mata Pelajaran) Mental Ideologi cukup berhasil memberikan pemahaman dan keyakinan peserta didik terhadap ideologi Pancasila. Namun implementasinya dalam kehidupan sosial ekonomi belum cukup berhasil seperti dicerminkan dalam sub indikator mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi, keluarga dan golongan, merupakan sikap yang paling lemah, dibandingkan indikator lain ia hanya mendapat skor sedang.

Berikut ini adalah hasil survey untuk mengukur besarnya pengaruh pendidikan di Pusdiklat X terhadap militansi dan loyalitas kepada perusahaan.

Tabel 7

Pengaruh Pendidikan Terhadap Militansi & Loyalitas

No	Menurut Anda seberapa besar pengaruh pendidikan di Pusdiklat X dalam meningkatkan militansi dan loyalitas kepada perusahaan tempat Anda bekerja saat ini ?	Antara ada dan tidak ada pengaruhnya % (A)	Besar & Sangat Besar Pengaruhnya % (B)
a	Pejabat Struktural	35	64
b	Non Pejabat Struktural	24	73
a	Laki-Laki	24	75
b	Perempuan	39	56
a	Lama Bekerja < 5 tahun	17	76
b	Lama Bekerja 5-10 tahun	35	65
c	Lama Bekerja > 10 tahun	30	69

Sumber: Penulis (2025)

Dari tabel 7. responden dari kelompok pejabat 64% menyatakan pendidikan di Pusdiklat X besar dan sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan militansi dan loyalitas kepada perusahaan, 35 % menjawab antara ada dan tidak ada pengaruhnya. Sedangkan dari kelompok non pejabat yang menyatakan pengaruhnya besar dan sangat besar sebanyak 73% responden, sisanya 24% menjawab antara ada dan tidak

ada pengaruhnya. Dari hasil jawaban tersebut secara umum menyatakan bahwa pendidikan di Pusdiklat X besar pengaruhnya dalam meningkatkan militansi dan loyalitas kepada perusahaan. Yang patut menjadi perhatian ternyata pengaruhnya lebih besar dirasakan oleh responden dari kelompok non pejabat dibandingkan dengan kelompok pejabat.

Terdapat dua kemungkinan yang dapat dianalisis, *pertama* responden kelompok non pejabat rata-rata masa kerjanya dibawah 5 tahun dan sebagian besar berusia antara 25-35 tahun sehingga pendidikan seperti ini merupakan pengalaman yang baru dalam dunia kerja dan memberi wacana serta harapan baru dalam menapaki jenjang karir selanjutnya, *kedua*, kelompok pejabat pada umumnya telah memiliki masa kerja diatas 5 tahun dan sudah memiliki pondasi yang kuat serta teruji loyalitasnya sehingga materi yang sama tidak cukup kuat memberikan pengaruh terhadap peningkatan militansi dan loyalitas. Jika dipotret dari survey bela negara, pada indikator cinta tanah air memiliki korelasi yang kuat pada sub indikator bangga sebagai bangsa Indonesia, kita bisa membawa indikator ini dalam tataran organisasi perusahaan. Karyawan akan memiliki loyalitas kepada perusahaan manakala ia memiliki kebanggaan pada perusahaan tempatnya bekerja. Maka untuk memberikan pengaruh yang lebih besar bagi kelompok pejabat terhadap peningkatan militansi dan loyalitas, saya mengusulkan perlunya memberikan materi-materi pelatihan yang membangkitkan kebanggaan terhadap perusahaan.

Ditinjau dari perbedaan gender, ternyata pendidikan di Pusdiklat X ini memberikan pengaruh yang lebih besar kepada responden laki-laki dibandingkan kepada responden perempuan, dalam meningkatkan militansi dan loyalitas. Data survey yang menyatakan besar dan sangat besar pengaruhnya, sebanyak 75% dari responden laki-laki sedangkan dari responden perempuan hanya 56%.

Ditinjau dari masa kerja relatif tidak ada perbedaan yang signifikan antara responden yang memiliki masa kerja < 5 tahun (76% menjawab besar dan sangat besar pengaruhnya) ; masa kerja 5-10 tahun (65%) maupun masa kerja >10 tahun (69%). Tetapi responden yang memiliki masa kerja ,5 tahun merupakan responden tertinggi yang menyatakan pendidikan ini besar pengaruhnya terhadap peningkatan militansi dan loyalitas terhadap perusahaan.

Dari ketiga aspek analisis itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Pusdiklat X memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan militansi dan loyalitas kepada perusahaan. Pengaruh terbesar diterima oleh responden laki-laki, dari kelompok non pejabat dan memiliki masa kerja dibawah 5 tahun.

Tabel berikut adalah hasil survey untuk mengukur seberapa besar pengaruh pendidikan di Pusdiklat X dalam meningkatkan kepedulian sosial.

Tabel 8
Pengaruh Pendidikan Terhadap Kepedulian Sosial

No	Menurut Anda seberapa besar pengaruh pendidikan di Pusdiklat X dalam meningkatkan kepedulian sosial ?	Antara ada dan tidak ada pengaruhnya % (A)	Besar & Sangat Besar Pengaruhnya % (B)
a	Pejabat Struktural	42	58
b	Non Pejabat Struktural	32	63
a	Laki-Laki	33	66
b	Perempuan	47	51
a	Lama Bekerja < 5 tahun	21	71
b	Lama Bekerja 5-10 tahun	41	59
c	Lama Bekerja > 10 tahun	41	59

Sumber: Penulis (2025)

Jawaban responden atas pertanyaan seberapa besar pengaruh pendidikan di Pusdiklat X dalam meningkatkan kepedulian sosial, ternyata relatif sama dengan jawaban atas pengaruh pendidikan di Pusdiklat X terhadap meningkatnya militansi dan loyalitas. Responden dari kelompok pejabat 58% menyatakan pendidikan di Pusdiklat X besar dan sangat besar pengaruhnya dalam meningkatkan kepedulian sosial, 42 % menjawab antara ada dan tidak ada pengaruhnya. Sedangkan dari kelompok non pejabat yang menyatakan pengaruhnya besar dan sangat besar sebanyak 63% responden, sisanya 32% menjawab antara ada dan tidak ada pengaruhnya.

Ditinjau dari perbedaan gender, ternyata pendidikan di Pusdiklat X ini memberikan pengaruh yang lebih besar kepada responden laki-laki dibandingkan kepada responden perempuan, dalam meningkatkan kepedulian sosial. Data survey yang menyatakan besar dan sangat besar pengaruhnya, sebanyak 66% dari responden laki-laki sedangkan dari responden perempuan hanya 51%. Namun ditinjau dari masa kerja terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara responden yang memiliki masa kerja < 5 tahun (71% menjawab besar dan sangat besar pengaruhnya) dengan responden dengan masa kerja 5-10 tahun (59%) maupun masa kerja >10 tahun (59%). Dari ketiga aspek analisis itu dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Pusdiklat X memberikan pengaruh yang besar dalam meningkatkan kepedulian sosial. Pengaruh terbesar diterima oleh responden laki-laki, dari kelompok non pejabat dan memiliki masa kerja dibawah 5 tahun.

Tabel 9
Pengaruh Pendidikan Terhadap Kegiatan Sosial

No	Seberapa sering Anda terlibat dalam kegiatan X Peduli?	Tidak Pernah & Kadang-kadang % (A)	Cukup Sering & Sangat Sering % (B)
a	Pejabat Struktural	49	51
b	Non Pejabat Struktural	51	46
a	Laki-Laki	45	53
b	Perempuan	61	37
a	Lama Bekerja < 5 tahun	42	50
b	Lama Bekerja 5-10 tahun	50	50
c	Lama Bekerja > 10 tahun	53	47

Sumber: Penulis (2025)

Dari data tersebut ternyata keterlibatan responden, baik pejabat dan bukan pejabat, laki-laki dan perempuan maupun yang masa kerjanya berbeda relatif sama. Perbedaan yang cukup signifikan hanya terdapat pada responden laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang menjawab cukup sering dan sangat sering adalah 53% sedangkan perempuan yang menjawab cukup sering dan sangat sering adalah 37%. Dari penelusuran dokumen kegiatan X Peduli melalui foto-foto dan video diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan membutuhkan kemampuan fisik dan psikis yang baik, sehingga wajar bila keterlibatan perempuan dalam kegiatan ini lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Kegiatan sosial dan kemanusiaan yang dilakukan X Peduli, misalnya penanggulangan bencana alam, banjir, kebakaran serta bantuan kemanusiaan seperti pembagian sembako kepada masyarakat kurang mampu, pembagian hewan kurban, penjualan sembako murah dsb. Pada demografi karyawan dalam organisasi di X Network. Dari sampel 128 responden, terdiri atas 55 orang pejabat struktural (43%) dan 73 orang non pejabat (57%). Sebanyak 24 orang (19%) mempunyai masa kerja < 5 tahun; 34 orang (26%) mempunyai masa kerja 5-10 tahun dan 70 orang (55%) mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun. Hal ini menjelaskan bawa loyalitas

karyawan di X Network terbukti dari banyaknya karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun. Tingginya jumlah pejabat yang mempunyai masa kerja diatas 10 tahun (59%) juga menjelaskan bahwa di X Network, jenjang karier dicapai melalui pengalaman kerja dan masa pengabdian, tidak banyak karyawan yang memegang jabatan struktural dengan masa kerja kurang dari 5 tahun.

Hasil penelitian dan analisis kurikulum Pusdiklat X ini dapat menjawab rumusan masalah yang pertama dalam artikel ini, bahwa kurikulum ini dimaksudkan bukan untuk pendidikan bela negara melainkan untuk pembentukan karakter karyawan yang loyal dan militan, namun materi kurikulum yang telah dilaksanakan ini bermuatan bela negara memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik terhadap kepedulian sosial dan keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan bela negara.

KESIMPULAN

Secara teoritis mempersiapkan kekuatan pertahanan negara adalah sebuah keharusan bagi bangsa yang menginginkan perdamaian karena kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh suatu bangsa akan dapat menjadi daya tangkal yang ampuh untuk mencegah bangsa lain melakukan konfrontasi sesuai dengan adagium klasik "*civis pacem parvabellum*" bahwa apabila ingin damai harus siap untuk berperang. Bahwa pertahanan negara yang bersifat semesta melibatkan seluruh komponen bangsa dan bertumpu pada komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Berangkat dari masalah perubahan ancaman dalam lingkungan geopolitik, geoekonomi dan geostrategis dimana ancaman-ancaman nir-militer akan lebih mengemuka dibandingkan dengan ancaman militer maka persoalan pertahanan negara bukan lagi menjadi persoalan militer atau TNI saja melainkan menjadi persoalan semua komponen bangsa.

Kenyataan bahwa RUU Komcad tak kunjung menjadi sebuah Undang Undang meskipun draftnya sudah siap sejak 2005 dan menjadi RUU Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, agaknya tak lepas dari kebimbangan banyak pihak tentang implementasinya bila draft tersebut menjadi undang-undang. Konsekuensi biaya yang besar dan kerumitan penyusunan kelembagaannya menjadi kendala utama. Tidak terbangunnya kesamaan persepsi antara pemerintah selaku perumus kebijakan dengan masyarakat sebagai obyek pembentukan Komponen Cadangan selama ini, mengakibatkan konsep pembentukan Komponen Cadangan menuai kontroversi bahkan penolakan di masyarakat.

Belum adanya manajemen sumber daya pertahanan negara yang merupakan proses pengelolaan seluruh sumber daya nasional menjadi kekuatan nasional untuk kepentingan pertahanan negara sehingga pada saat diperlukan dapat ditransformasikan ke dalam upaya pertahanan negara baik untuk perlawanan bersenjata atau tidak bersenjata. Pengorganisasian/tataran kewenangan yang mewadahi kegiatan pembinaan sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional belum tersusun dengan baik, masih belum melibatkan berbagai komponen lainnya secara jelas. Belum adanya payung hukum yang mengikat sebagai wujud bagi tunduknya usaha pertahanan negara terhadap prinsip demokrasi, HAM, ketentuan hukum nasional dan hukum internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai menjadikan sistem pertahanan semesta hanya sebatas konsep yang idealis.

X Network, sebuah korporasi swasta memiliki kurikulum pendidikan untuk karyawannya, semula dimaksudkan sebagai pembentukan karakter karyawan yang tangguh, militan dan setia

pada tugas, telah mengadopsi *spirit* TNI dalam mendidik prajuritnya. Hasilnya kurikulum ini ternyata memberikan pengaruh yang positif kepada peserta didik terhadap peningkatan militansi dan loyalitas kepada perusahaan serta semangat bela negara dan kepedulian sosial melalui kegiatan yang dilakukan oleh X Peduli, sebuah yayasan yang sengaja dibentuk untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan. X Peduli dalam melaksanakan kegiatannya seringkali manunggal bersama TNI dan lembaga pemerintah lain seperti BNPB dan Basarnas. Contoh sederhana ini dapat menggambarkan bahwa hubungan sipil militer tidak melulu hanya konsep supremasi sipil atas militer atau sebaliknya, namun dapat terjalin melalui hubungan yang sangat sederhana, tetapi memberikan dampak sinergitas yang besar.

Hasil penelitian dan analisis melalui pendekatan mix method terhadap kurikulum Pusdiklat X ini dapat menjawab rumusan masalah yang pertama dalam tesis ini, bahwa kurikulum ini dimaksudkan bukan untuk pendidikan bela negara melainkan untuk pembentukan karakter karyawan yang loyal dan militan, namun materi kurikulum yang sudah dilaksanakan ini sudah mirip dengan kurikulum yang sudah dilaksanakan oleh Dirjen Pothan, memang perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Kurikulum ini memberikan pengaruh kepada peserta didik terhadap kepedulian sosial dan keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan bela negara.

Hasil wawancara pendalaman kepada pemerintah dapat menjawab rumusan masalah yang kedua bahwa inisiatif dan proaktif dari sebuah institusi mendapat tingkat apresiasi tetapi belum mampu mendorong aktualisasi aspek hukum dalam mendukung operasionalisasinya.

SARAN

Untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, artikel ini juga menganalisis RUU Komponen Cadangan sebagai kerangka berpikir dan sebagai landasan hukum terhadap mekanisme pelibatan korporasi sebagai kekuatan nir-militer dalam pertahanan negara serta mengidentifikasi dan menganalisis kurikulum pendidikan dan latihan di korporasi X Network, khususnya di Pusdiklat Cibogo, Jawa Barat dan pengaruhnya terhadap militansi dan loyalitas karyawan kepada perusahaan serta pengaruhnya terhadap semangat bela negara.

Agar tujuan ini tercapai dan manfaat penelitian dapat terpenuhi maka saran yang diajukan peneliti ditujukan *pertama*, kepada pemerintah, *kedua* kepada manajemen X Network dan *ketiga* ditujukan kepada peneliti lain.

Pemerintah khususnya Kementerian Pertahanan hendaknya melakukan upaya-upaya yang berkesinambungan guna terbangunnya kesamaan persepsi tentang pentingnya pembentukan Komponen Cadangan Pertahanan Negara, antara perumus dengan pelaksana kebijakan yaitu antara pemerintah/Kemhan dan TNI dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Badan Usaha dan masyarakat melalui penyusunan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang jelas, proporsional dan sistematis, dengan cara menyempurnakan RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara yang mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang, khususnya berkaitan dengan kejelasan status warga negara dalam Komponen Cadangan, jenis keahlian/ketrampilan yang dibutuhkan serta peran seluruh stakeholders dalam Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang melibatkan Pemerintah bersama DPR.

Status “wajib” bagi warga negara yang berumur 18 tahun dan telah memiliki pekerjaan untuk menjadi Komponen Cadangan, dapat dipertimbangkan untuk diubah menjadi “wajib secara selektif”, sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh tiap matra komponen utama, sekaligus mencantumkan jenis keahlian dan ketrampilan tersebut dalam penjelasan RUU.

Sehubungan dengan hal itu, dalam rangka mewujudkan *good governance* maka perekrutan harus benar-benar dilaksanakan secara selektif dan memprioritaskan kepada warga negara yang memiliki jenis keahlian dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh tiap matra komponen utama. Dengan demikian Komponen Cadangan benar-benar akan berfungsi sebagai kekuatan pengganda yang mampu memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Dalam kondisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat dinamis saat ini, undang-undang yang justru sangat penting untuk dibuat adalah undang-undang yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab setiap komponen nir-militer agar dapat berfungsi sebagai elemen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer. Dengan undang-undang ini setiap komponen nir-militer dibawah koordinasi kementerian terkait dibangun kesadaran bela negaranya melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan agar memiliki kemampuan untuk menangkal setiap ancaman non militer sesuai dengan fungsi, tugas dan keahlian yang dimiliki. Maka seharusnya pemerintah segera mendorong diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang pelibatan komponen non militer dalam pertahanan nir-militer. Agar lebih dapat diterima oleh masyarakat luas, peneliti mengusulkan RUU Komponen Cadangan dan RUU Komponen Pendukung dijadikan satu diubah namanya menjadi RUU Bela Negara.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan publik hendaknya dapat menciptakan cara-cara yang dapat menstimulir korporasi swasta agar lebih berperan aktif dalam mengimplementasikan kesadaran bela negara dalam menjalankan usahanya. Kementerian Pertahanan melalui Direktorat Bela Negara, khususnya Sub Direktorat Lingkungan Pekerjaan dapat mendata perusahaan-perusahaan yang memiliki sarana-prasarana maupun program pendidikan bagi karyawannya yang dapat dikembangkan menjadi pendidikan bela negara.

Kurikulum pendidikan pembentukan karakter yang dilakukan oleh X Network setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian oleh Kemhan dapat dijadikan model atau jalan tengah oleh pemerintah untuk diterapkan bersama korporasi swasta yang lain dengan swadana korporasi masing-masing, karena terbukti berpengaruh positif terhadap bela perusahaan dan bela negara. Manakala korporasi-korporasi swasta secara sinergis melakukan hal ini secara bersama-sama maka akan membantu pemerintah mewujudkan sistem pertahanan semesta bukan lagi sekedar sebuah konsep. Melalui kurikulum pembentukan karakter karyawan akan tercipta embrio yang kelak dapat dikembangkan menjadi komponen cadangan. Dengan memanfaatkan “bahan baku” yang siap pakai, ongkos membangun sistem pertahanan semesta tentu akan menjadi lebih murah.

Untuk manajemen X Network disarankan untuk terus melanjutkan kurikulum pendidikan pembentukan karakter karena nyata-nyata berpengaruh positif bagi peserta didik terhadap militansi dan loyalitas kepada perusahaan dan meningkatkan semangat bela negara. Agar memberikan pengaruh yang lebih besar kepada peserta didik dari kelompok pejabat dan karyawan yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, hendaknya dilakukan revisi dan penyesuaian kurikulum serta kurikulum yang berjenjang agar dapat dilaksanakan sebagai program penyegaran (*refreshment*) secara periodik.

Warga negara akan meningkat kecintaannya kepada tanah air manakala ia memiliki kebanggaan nasional, dan ia akan rela berkorban demi membela kedaulatan tanah airnya. Demikian juga karyawan akan memiliki kecintaan kepada perusahaannya manakala ia memiliki kebanggaan terhadap perusahaannya, dan ia akan rela bekerja keras demi memperjuangkan kemajuan perusahaannya. Berpijak dari situ hendaknya perusahaan memberikan pendidikan yang berkelanjutan, remunerasi yang pantas dan seimbang, kenyamanan serta jaminan keamanan dalam bekerja.

Kepada peneliti yang lain dapat melakukan penelitian yang sama dengan kajian pada perusahaan yang berbeda sehingga akan diperoleh data yang lebih luas dan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif.

REFERENSI

- Angela, D., & Kosandi, M. (2019). Military Business in Indonesia: Army Cooperative After Acquisition Policy 2009 and Its Impact on Civil-Military Relations. *International Journal of Social Science and ...*, October, 6475–6493. https://www.researchgate.net/profile/Meidi_Kosandi/publication/337632311_Military_Business_in_Indonesia_Army_Cooperative_after_Acquisition_Policy_2009_and_Its_Impact_on_Civil-military_Relations/links/5de13e7292851c83645476fd/Military-Business-in-Indonesia
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry & Research Design* (Third). SAGE Publications Asia-Pacific Pte.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*.
- Echevarria, A. J. (2005). *Strategic Studies Institute , US Army War College FOURTH-GENERATION WAR AND OTHER MYTHS Author (s) : Antulio J . Echevarria <suffix> II </suffix> Strategic Studies Institute , US Army War College (2005) Stable URL : https://www.jstor.org/stable/resrep1. May.*
- Kadiman, K. (2006). *Indonesia 2005 - 2025 Buku Putih*. 1–100.
- Priyono, J., & Yusgiantoro, P. (2017). *Geopolitik, Geostrategi, Geoekonomi*. Unhan Press.
- Publications, S., & Council, C. I. (2016). *Review Author (s) : William T . R . Fox Review by : William T . R . Fox Published by : Sage Publications , Ltd . on behalf of the Canadian International Council Stable URL : http://www.jstor.org/stable/40202323 Accessed : 13-06-2016 09 : 16 UTC. 40(4), 756–758.*
- Rizani, N. (2020). Prabowo Subianto dan pandangan pertahanan geostrategis Indonesia : Antara Amerika Serikat-Tiongkok dan ASEAN. *THC INSIGHT : The Habibie Center*, 09(09), 1–6. <http://habibiecenter.or.id/img/publication/5220c07b208cc692e380a55b42ce9552.pdf>
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- Sinaga, H. R. P. (2017). PENDIDIKAN BELA NEGARA YANG DISELENGGARAKAN PUSDIKIF EDUCATION OF STATE DEFEND HELD IN PUSDIKIF Herbert. *Jurnal Prodi Peperangan Asimetris*.
- Zimmerli, W. C. (2018). Si vis pacem para bellum! on the indispensable pitfalls in the piecemeal engineering of peace. *Studies in Christian Ethics*, 31(2), 229–238. <https://doi.org/10.1177/0953946817749900>